



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## DAMPAK KELUARNYA AS DARI *PARIS AGREEMENT* TERHADAP INDONESIA

**Anugrah Juwita Sari**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[anugrah.sari@dpr.go.id](mailto:anugrah.sari@dpr.go.id)

**T. Ade Surya**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teuku.surya@dpr.go.id](mailto:teuku.surya@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 pada 21 Januari 2025, Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Langkah ini diambil atas dasar anggapan Trump bahwa *Paris Agreement* merupakan sebuah penipuan, yang tidak adil dan sepihak. Sebelumnya, AS pernah menyatakan penarikan diri dari *Paris Agreement* pada tahun 2019 saat Donald Trump menjabat sebagai presiden di periode pertama, namun AS kembali bergabung pada tahun 2021 di saat pemerintahan Joe Biden. Dengan keputusan ini, AS bergabung dengan negara-negara seperti Iran, Libya, dan Yaman yang tidak menjadi bagian dalam perjanjian tersebut. AS akan resmi keluar dari *Paris Agreement* pada 27 Januari 2026.

Keluarnya AS dari *Paris Agreement* secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Indonesia. Sejumlah peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memaparkan bahwa keluarnya AS dari *Paris Agreement* dapat mempersulit pendanaan untuk penanganan perubahan iklim (*climate financing*), yang sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dari sisi lingkungan, Indonesia menghadapi risiko meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat penurunan insentif global untuk pengurangan emisi, yang akan memperburuk dampak perubahan iklim dan mengancam target energi bersih yang telah dicanangkan. Sementara dari sisi ekonomi, keputusan tersebut berpotensi memengaruhi investasi hijau di Indonesia, terutama karena AS merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam pendanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Meskipun bukan satu-satunya negara pendonor, ketidakpastian komitmen AS dapat mengancam keberlangsungan JETP, menyebabkan Indonesia kehilangan potensi sumber pendanaan terbesar untuk transisi energi dan membahayakan keberlangsungan proyek-proyek yang sedang berjalan. Keputusan yang diambil oleh AS ini juga dapat menurunkan aliran investasi hijau dari perusahaan-perusahaan AS ke Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pendorong pengembangan energi terbarukan dan proyek ramah lingkungan.

Sejumlah peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai keputusan AS keluar dari *Paris Agreement* berpotensi memengaruhi percepatan elektrifikasi di sektor transportasi serta memicu gejolak harga nikel dan baterai di pasar internasional. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang tengah berupaya memasukkan nikel dan hasil hilirisasi mineral ke dalam rantai pasok global, termasuk pasar AS. Selain itu, keputusan tersebut juga dapat menimbulkan keraguan bagi Indonesia dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan (EBET). Hal ini disebabkan oleh keputusan AS, sebagai salah satu pelopor traktat internasional tentang mitigasi perubahan iklim, yang memilih mundur dari *Paris Agreement* dan mengevaluasi pendanaan untuk sejumlah negara dengan tujuan untuk mengurangi anggaran kerja sama internasional.

Namun di sisi lain, keluarnya AS dari *Paris Agreement* membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat transisi energi secara mandiri tanpa bergantung pada dukungan AS. Situasi ini

juga mendorong Indonesia untuk memperluas dan mempererat kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen tinggi dalam isu lingkungan dan pengembangan teknologi hijau, seperti Uni Eropa dan negara-negara Asia. Sejumlah peneliti menilai Timur Tengah dapat menjadi alternatif dalam kerja sama transisi energi untuk meredam dampak keluarnya AS dari *Paris Agreement*. Timur Tengah memiliki potensi besar sebagai mitra pembangunan Indonesia dan telah menunjukkan dukungannya, seperti kerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Waduk Cirata, Jawa Barat.

Selanjutnya, keluarnya AS dari *Paris Agreement* dapat memicu peningkatan riset dan pengembangan teknologi hijau di dalam negeri serta mendorong inovasi lokal yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di sektor energi dan lingkungan. Indonesia dapat lebih fokus dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang cukup melimpah dan beragam, seperti energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut. Selain itu, Indonesia juga dapat memfokuskan diri untuk memperbaiki iklim investasi di sektor EBET.

## Atensi DPR

Keluarnya AS dari *Paris Agreement* dapat berdampak pada sektor energi dan lingkungan di Indonesia. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, termasuk upaya melakukan transisi energi. Namun, situasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memacu kemandirian energi dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lainnya. Komisi XII DPR RI perlu memberikan atensi atas keluarnya AS dari *Paris Agreement* dan potensi dampaknya bagi Indonesia. Komisi XII DPR RI perlu memastikan pemerintah tetap berkomitmen pada target pengurangan emisi dan transisi menuju pemanfaatan energi bersih meskipun pendanaan internasional, terutama dari AS, terancam menurun. Komisi XII DPR RI bersama pemerintah juga perlu mempercepat pembentukan undang-undang yang mendukung transisi energi untuk mendorong pengembangan energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia.

## Sumber

antaranews.com, 21, 22, 23, 30 Januari, dan 6 Februari 2025;  
bisnis.com, 21 dan 29 Januari 2025;  
cnnindonesia.com, 21 Januari 2025;  
kompas.com, 1 Februari 2025;  
*Koran Tempo*, 4 Februari 2025; dan  
*Media Indonesia*, 3 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*